

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
- Abdurachman Rochimi. *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*. (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2010).
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju. 2008).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991).
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*. (Bandung: Nusa Media, 2008).
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refka Aditana, 2011).
- Hadi Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007).
- Ihwan, et al., *Ekslopedi Haji dan Umrah*, cetakan ke 1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- IL. Pasaribu dan B. Simanjuntak. *Proses Belajar*. (Bandung: Jaya Baru. 1993).
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Joko Subagyo. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti. 2001).

- Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Putra Abardin, 1977).
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti. 1995).
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982).
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Sadar, M., dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia. 2012).
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2001).
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo. 2000).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, (Bandung, Mandar Maju, 2002).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013).
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1989),
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 1989).
- Syaamil. *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Per Kata*. (Bandung: PT. Sygma Publishing, 2010).
- Tengku Muhamad Hasby ash Shiddieqy. *Sejarah & Pengantar Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001).
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1998).
- Winarno Surachmad. *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian*, (Bandung: Transito, 1990).

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi oleh J. Satrio, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2015.
- Novirizdya, Shella. 2016. "Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan dan Manfaat PT. Tisaga Multazam Utama dalam Pelaksanaan Haji di Arafah dan Mina". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Semarang.
- Retno Apriani. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Jemaah Ibadah Haji Khusus Dan Umrah Akibat Keterlambatan Pemberangkatan". *Jurnal*. https://www.Academia.Edu/6081254/I_perlindungan_hukum_terhad

ap.jemaah.ibadah.haji.khusus.dan.umrah.akibat.keterlambatan.pe.mberangkatan.retno.apriani?Auto=Download.

- Ruswandana, Nathasya Victoria. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Semarang.
- Sihabudin Mukhlis. "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah". *Artikel Ilmiah*. Pesantren Mahasiswa Peradaban, Bandung, 2018.
- Sri Hartati Samhadi, *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, <http://training-ethos.blogspot.com>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018.
- Suyadi. 2016. "Kajian Yuridis Terhadap Jemaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Sainteks*. Vol 7, No 2, 2016. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Putusan Mahkamah Agung (MA) Tingkat Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018;
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIV/2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur
Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah.